

Evaluasi Pengadaan Laptop Ber-TKDN dalam Meningkatkan *Value for Money* dan Pengembangan Produk Dalam Negeri

Evaluation of Laptop Procurement with TKDN in Increasing Value for Money and Developing Domestic Products

Indrani Dharmayanti^{1*}, Muhammad Kahar Akbar Palinrungi², Aster Aryati¹, dan Yevita Nursyanti¹

¹ Program Studi Manajemen Logistik Industri Elektronika, Politeknik APP, Kementerian Perindustrian
Jl. Timbul 34, Jagakarsa, DK Jakarta, 12630

² Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
Jl. Jend. Soedirman, Gedung C, Lt.14, Senayan, DKI Jakarta, 10270

Diterima: 29 Januari 2025; Direvisi: 18 Maret 2025; Disetujui: 15 April 2025

ABSTRAK

Pengadaan laptop oleh pemerintah sudah dituntut menggunakan produk dalam negeri karena sudah terdapat produk laptop dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Dalam rangka efisiensi proses pengadaan, mekanisme ditempuh melalui konsolidasi pengadaan menggunakan katalog elektronik. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pemerintah terhadap produk laptop tinggi dan menggunakan anggaran yang besar. Penelitian ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengadaan laptop ber-TKDN yang dibeli oleh pemerintah melalui program konsolidasi nasional, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengadaan tersebut serta menganalisis persepsi pengguna terhadap kualitas dan kinerja laptop ber-TKDN. Metode menggunakan analisis persepsi dan diolah serta disajikan dengan statistik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan laptop Produk Dalam Negeri (PDN) dapat dikatakan sudah cukup efektif dengan terpenuhinya sebagian besar kebutuhan organisasi meski masih terdapat aspek spesifikasi laptop (processor, RAM dan HDD) yang masih kurang memenuhi. Konsolidasi juga lebih efisien bila dibanding pengadaan satuan oleh masing-masing institusi karena harga sudah ditentukan batas atasnya dan masih memungkinkan dilakukannya negosiasi pada pembelian *e-purchasing*. Pemerintah telah mendapatkan *value for money* yang baik dari aspek kuantitas pasokan, waktu dan tempat penyerahan, harga serta penyedia dan layanannya. Namun, dari aspek mutu masih ditemui berbagai keluhan. Faktor yang memengaruhi efektivitas pengadaan laptop PDN diantaranya identifikasi kebutuhan dan penetapan spesifikasi serta negosiasi harga produk Laptop PDN yang akan dikonsolidasikan, juga pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan dan penyimpangan saat implementasi.

Kata kunci: efektivitas dan efisiensi pengadaan, konsolidasi pengadaan, produk dalam negeri, *value for money*, TKDN

ABSTRACT

The government's procurement of laptops is now required to use domestically manufactured products. For process efficiency, procurement consolidation is achieved using an electronic catalog. The research aims to evaluate the effectiveness and efficiency of the TKDN laptops procurement through the national consolidation program, identify factors influencing the effectiveness and efficiency, and analyze user perceptions of the quality and performance of the products. The study employs perception analysis, which is processed and presented using descriptive statistics. The findings indicate that the consolidated procurement of domestically produced laptops is relatively effective, as it meets most organizational needs,

*) Korespondensi:

Jl. Timbul 34, Jagakarsa, DK Jakarta, 12630; email: iindh522@gmail.com

although some laptop specifications (e.g., processor, RAM, and HDD) remain inadequate. Consolidation is also more efficient than individual procurement, because it determines the upper price limit, and allows it to be negotiated during the transaction. Best value for money has been obtained in terms of supply quantity, delivery time and location, price and service provider. But there are still complaints about quality. Factors that influence procurement effectiveness include identifying needs, determining specifications and negotiating prices, as well as monitoring and reporting deviations during implementation.

Key words: domestic products, procurement consolidation, procurement effectiveness and efficiency, value for money, TKDN

PENDAHULUAN

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu strategi yang umum diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menggalakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mendukung industri lokal. Di era digital ini, penggunaan teknologi informasi, terutama laptop, menjadi sangat penting dalam berbagai sektor, termasuk pada sektor pendidikan, pemerintahan, dan bisnis, sehingga hampir setiap tahun kebutuhan laptop terutama di Pemerintah sangatlah besar. Hal ini merupakan peluang pasar yang sangat besar bagi para produsen laptop produk dalam negeri (PDN). Dalam meningkatkan penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah sudah mewajibkan penggunaan PDN apabila sudah terdapat barang dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Untuk produk Laptop, karena telah memenuhi ketentuan tersebut, maka sudah diwajibkan membeli PDN dengan TKDN minimal 25%.

Hal ini direspon oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga perumus kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dengan melakukan pengadaan melalui program konsolidasi nasional. Melalui konsolidasi maka skala ekonomi atas paket pengadaan barang jasa akan meningkat sehingga pelaksanaan pengadaannya dapat lebih efektif dan efisien untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*). Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Banyak pengguna, terutama di kalangan pemerintah, menghadapi berbagai keluhan terkait dengan produk dalam negeri yang mereka gunakan. Keluhan tersebut meliputi harga yang mahal, kualitas yang tidak memuaskan, waktu pemenuhan yang lama, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap

efektivitas dan efisiensi pemenuhan barang dari produk dalam negeri menjadi sangat penting.

Dengan melakukan evaluasi, dapat dinilai sejauh mana kebijakan penggunaan produk dalam negeri telah mencapai tujuannya dalam memberikan produk dengan nilai yang sebanding dengan biayanya (*value for money*). Selain itu, evaluasi ini juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan industri nasional, dengan memperhatikan berbagai keluhan dan masukan dari para pengguna untuk terus meningkatkan sistem produksi pada industri manufaktur, sehingga kualitas bisa lebih baik, harga berdaya saing, serta pemenuhan yang tepat waktu.

Penelitian tentang pengukuran efektivitas sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya pada berbagai bidang, seperti pada bidang pendidikan (Junaedi, 2019), bidang kesehatan (Perestroika, 2022), bidang pembangunan infrastruktur dan konstruksi (Mangerongkonda, 2019; Ferdian & Reski, 2020) dan pada beberapa bidang lainnya. Dari penelitian-penelitian yang membahas tentang pengukuran efektivitas sebuah program, termasuk program pemerintah, umumnya menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengukur seberapa besar efektivitas implementasi dari program tersebut. Kemudian dipadu juga dengan penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai hal seperti kendala dan permasalahan dalam mengimplementasikan program tersebut dengan mengumpulkan informasi dari para aktor yang mengimplementasikan program tersebut.

Pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga telah dirumuskan dan diimplementasikan berbagai program, kebijakan maupun aturan. Beberapa penelitian yang dilakukan dalam pengukuran efektivitas sebuah proses pengadaan diantaranya Justiani (2022), yang mengevaluasi seberapa besar efektivitas proses pengadaan secara elektronik di Kabupaten Bone. Selain itu, Fingkreuw (2022) tentang Efektivitas Perencanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemerintahan di Papua, serta penelitian Tanesia (2018) tentang Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik.

Terkait dengan penelitian tentang penggunaan produk dalam negeri baru ditemukan beberapa penelitian seperti Sari *et al.*, (2023) yang meneliti tentang rasa bangga menggunakan produk lokal dalam meningkatkan eksistensi UMKM. Penelitian Wibowo (2022), mengupas tentang Strategi Peningkatan Penggunaan Produk UMK Pasca UU Cipta Kerja. Penelitian Zulmawan (2023) juga membahas tentang efektivitas penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa namun dari aspek aturan. Selanjutnya, penelitian Zakaria *et al.*, (2023) tentang Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN Terhadap Daya Saing Produk Keramik, dan juga penelitian terkait TKDN dalam pengadaan barang jasa perguruan tinggi dilakukan oleh Yulianti (2023).

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di atas, yang secara khusus penelitian terkait dengan pengukuran tingkat efektivitas pengadaan barang khususnya Laptop yang ber-TKDN pada program Konsolidasi Nasional belum ada yang melakukannya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan aspek kebaruan dari penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengadaan laptop ber-TKDN yang dibeli oleh pemerintah melalui program konsolidasi nasional, (2) mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengadaan laptop ber-TKDN, serta (3) Menganalisis persepsi pengguna terhadap kualitas dan kinerja laptop ber-TKDN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan *mix method*, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan pada saat pengumpulan data primer dengan meminta informasi persepsi terkait dengan berbagai aspek dan indikator efektivitas dalam pengadaan laptop ber-TKDN dengan konsolidasi nasional. Persepsi dari responden dikuantifikasikan dan diolah menggunakan statistik deskriptif.

Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas pada program ini didasarkan pada pencapaian tujuan pengadaan yaitu *the best value for money* yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek kualitas
2. Aspek kuantitas
3. Aspek biaya/harga
4. Aspek penyediannya
5. Aspek layanan

Berdasarkan beberapa indikator *value for money* tersebut, maka dikembangkan sebuah instrumen berbentuk kuesioner yang disebarakan kepada para responden yang menjadi target sampel. Untuk masing-masing indikator dirinci sub indikator/variabel yang merupakan definisi operasional yang mengukur berbagai persepsi dari responden terhadap variable/aspek di atas. Dalam penyusunan instrumen digunakan skala likert untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Kuesioner disampaikan kepada para responden terpilih melalui Google form, selanjutnya hasil dari jawaban para responden diolah dengan menggunakan aplikasi Excell untuk mendapatkan gambaran efektivitas dari pengadaan laptop ber-TKDN pada program konsolidasi nasional tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data, berikutnya diinterpretasikan dan dideskripsikan hasil rekapitulasinya.

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan data sekunder berasal dari literatur dan laporan yang mendukung dalam pengambilan Keputusan. Dalam hal ini data yang digunakan bersumber dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di LKPP.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan berkorespondensi dengan LKPP untuk mendapatkan data pengguna barang yang telah melakukan pembelian secara *e-purchasing*. Data primer dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada para responden yang berasal dari pengguna barang yang mengadakan laptop dengan *e-purchasing* di berbagai Kementerian, Lembaga dan Daerah, yang total jumlahnya sebanyak 59 responden yang dipilih secara acak mewakili Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 1. Untuk melengkapi dan mengkonfirmasi jawaban, dilakukan juga wawancara kepada sebagian responden yang dipilih dengan melakukan FGD yang melibatkan beberapa *stakeholder* Pengambil Kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil analisis data kuesioner dari responden, serta untuk mengidentifikasi usulan solusi berbagai masalah/kendala yang diketahui dari pengumpulan data kuesioner. *Stakeholder* Pengambil Kebijakan

tersebut antara lain: Ikatan Ahli Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Survei dilakukan kepada para pengguna laptop yang diadakan melalui *e-purchasing* pada Tahun 2022 dan 2023 dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Dengan besarnya populasi penelitian tersebut, maka dipilih sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu pembeli laptop pada SPSE.

Analisis data merupakan proses kegiatan yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Arikunto (2002) mengemukakan bahwa “Secara garis besar analisis data meliputi 3 langkah, yaitu (a) persiapan, (b) tabulasi dan (c) penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian”. Analisis data dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (a) reduksi data, (b) *display* data, dan (c) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pada penelitian kuantitatif, sebelum melakukan proses analisa data, maka terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data,
- b) Verifikasi data,
- c) Pemulusan data (menseleksi/mereduksi data dari responden mana yang digunakan).
- d) Pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi: jumlah jawaban, rata-rata kecenderungan jawaban, dan kemudian penyajian data yang menggambarkan rekapitulasi jawaban-jawaban responden dalam bentuk visual (diagram batang, diagram kue, dsb).

Perumusan rekomendasi dihasilkan dari berbagai usulan yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang kemudian dikonfirmasi kepada *stakeholder* pengambil kebijakan dalam sebuah forum FGD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sebuah kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah dikatakan efektif apabila barang jasa yang diadakan dapat memenuhi kebutuhan organisasinya. Oleh karena itu analisis kebutuhan pengguna (*user*) menjadi hal yang

penting dilakukan sebelum kegiatan pengadaan yaitu pada tahap perencanaan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dikatakan efisien apabila pengadaan tersebut menggunakan sumber daya yang optimal seperti sumber daya uang, waktu dan sumber daya manusia.

Pada program pengadaan laptop produk dalam negeri, untuk mewujudkan tingkat efektivitas maka ditempuh dengan cara mengidentifikasi kebutuhan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, media pembelajaran, serta keperluan administrasi perkantoran, LKPP melakukan analisis yang bersumber dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah disusun oleh K/L/PD. Dari hasil analisis tersebut ditetapkan spesifikasi yang dapat disediakan oleh laptop produk dalam negeri. Berdasarkan hasil evaluasi pada penelitian ini, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden telah terpenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian laptop PDN melalui konsolidasi tersebut.

Dari 59 responden yang tersebar di beberapa Kementerian, Lembaga dan beberapa pemerintah daerah Kota/Kabupaten maupun Provinsi diperoleh data bahwa hampir 78% telah melakukan pembelian laptop yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya sebagaimana dilihat pada Gambar 1, dan 19% memilih produk yang telah ditetapkan oleh LKPP meski ada kebutuhan organisasi yang tidak terpenuhi.

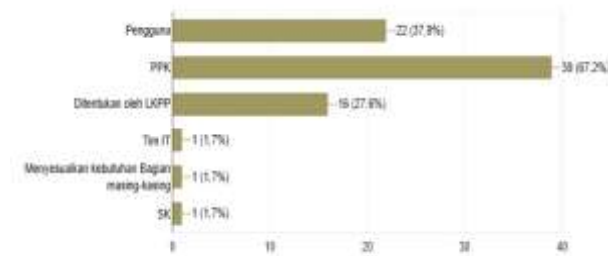


Gambar 1. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan

Selain itu identifikasi kebutuhan juga dilakukan pada sebagian organisasi yaitu kepada para pengguna, meski belum semua instansi. Hal ini terlihat dari Gambar 2, bahwa lebih dari 67% instansi penentuan spesifikasi dilakukan oleh PPK. Adapun kebutuhan organisasi pada umumnya akan laptop adalah untuk penggunaan pengetikan, olah data, presentasi, akses internet dan keperluan meeting. Lebih lengkap dapat dilihat pada data berikut:

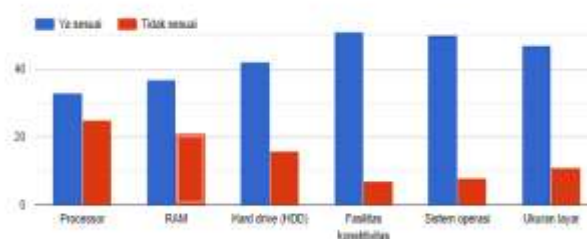
- Pengetikan (Word): 100%
- Pengolahan data (Excel): 100%

- Presentasi: 88%
- Editing gambar & Video: 56 %
- Akses internet: 84%
- Meeting (Zoom, Microsoft Team, dll): 84%
- Pengkodean: 4%
- Desain dan Rendering: 4%
- Desain grafis dan pemograman: 4%
- Mengoperasikan aplikasi yg ditentukan oleh lembaga pemerintah: 4%.



Gambar 2. Pihak penentu spesifikasi produk

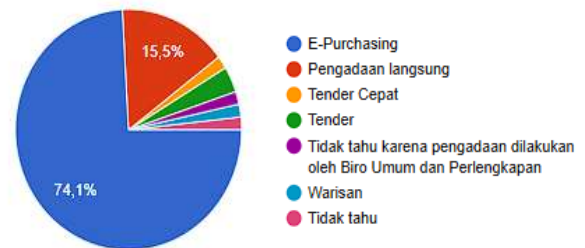
Berkaitan dengan spesifikasi produk yang didapatkan dibandingkan dengan kebutuhan yang direncanakan oleh organisasi sebagian besar organisasi telah menyatakan bahwa spesifikasinya sudah sesuai pada aspek fasilitas konektivitas, sistem operasi dan ukuran layar seperti terlihat pada Gambar 3. Namun dari aspek prosesor (43%), RAM (36%) dan HDD (27%) cukup banyak organisasi (27-43%) yang menyatakan bahwa spesifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 3. Kesesuaian spesifikasi produk dengan kebutuhan

Pada program pengadaan laptop produk dalam negeri, untuk mewujudkan tingkat efisiensi maka ditempuh dengan cara konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah strategi pengadaan yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis. Konsolidasi ini dilakukan untuk mendapatkan *value for money* dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti: regulasi, SDM, waktu, kualifikasi penyedia, dan penganggaran. Dengan konsolidasi maka proses pengadaan barang yang sejenis tidak perlu dilakukan secara berulang-

ulang. Salah satu strategi lainnya untuk mewujudkan tingkat efisiensi adalah melakukan pembelian melalui katalog elektronik (*e-purchasing*). Namun masih memungkinkan pengadaan dilakukan selain *e-purchasing* pada saat spesifikasi produk yang dibutuhkan organisasi tidak tersedia dalam spesifikasi program konsolidasi laptop PDN. Dari hasil kajian terlihat bahwa lebih dari 74% responden melakukan pengadaan melalui *e-purchasing* katalog elektronik, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.



Gambar 4. Metode pengadaan laptop PDN 2022-2023

Analisis *Value for Money* (VfM) dalam pengadaan barang dan jasa adalah konsep untuk mengukur apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai yang optimal bagi masyarakat. Analisis ini didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

- 1) Ekonomi, yaitu sejauh mana organisasi dapat meminimalkan *input resources* yang digunakan.
- 2) Efisiensi, yaitu perbandingan *output-input* dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- 3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Analisis VfM dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, meningkatkan kesadaran akan penggunaan dana publik. Untuk mencapai *value for money*, pengadaan barang dan jasa perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

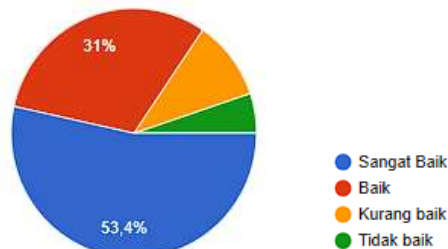
1) Kualitas produk hasil konsolidasi pengadaan Laptop PDN

Pada pengukuran kualitas produk laptop dilakukan dengan meminta penilaian kepada responden terhadap beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kondisi fisik/body laptop
- 2) Lama daya tahan baterai laptop
- 3) Performa/kinerja laptop

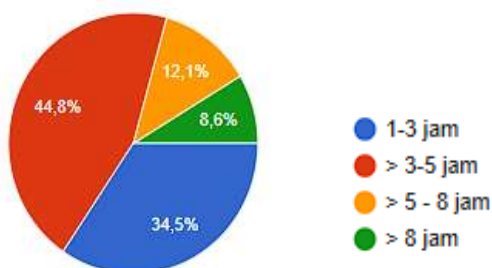
4) Laptop digunakan sampai terjadi kerusakan (*Hardware*)

Berdasarkan hasil survey yang terlihat pada Gambar 5, lebih dari 85% responden menyatakan bahwa kondisi body/fisik dari laptop yang dibeli dalam kondisi sangat baik dan baik. Hanya sekitar masing-masing 15 % yang menyatakan kondisi kurang baik dan tidak baik.



Gambar 5. Kondisi fisik laptop yang diadakan

Dari aspek lama daya tahan baterai laptop yang dibeli memiliki daya tahan mayoritas antara 3-5 jam (45%), 35% bertahan selama 1-3 jam, sisanya sekitar 20% dapat bertahan sampai dengan lebih dari 5 jam (Gambar 6).



Gambar 6. Ketahanan baterai laptop yang diadakan

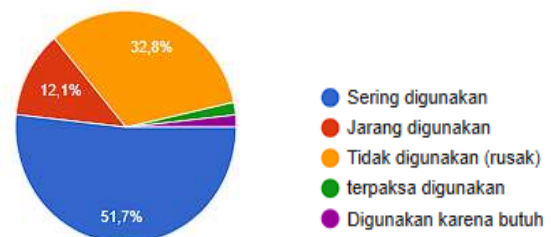
Berkaitan dengan aspek performa/kinerja laptop, sekitar 33% menyatakan laptop dapat loading dengan cepat saat membuka aplikasi, namun 50% menyatakan justru laptopnya lambat loading saat membuka aplikasi. Selain itu respon yang sering mengalami "hang" juga cukup banyak yaitu sekitar 53%, jarang hang 17% dan yang tidak pernah hang 16%. Performa laptop saat proses booting juga banyak yang mengeluhkan, karena sekitar 44% respon mengalami proses *booting* yang lambat, dan hanya 38% yang menyatakan proses *booting*nya cepat.

Terdapat beberapa responden juga yang mengeluhkan performa laptop karena mengalami kerusakan baik pada *charger* maupun pada kipasnya. Bahkan 18% responden laptopnya mengalami padahal masih kurang dari 1 bulan pemakaian. Lama waktu laptop digunakan sampai terjadi kerusakan (*hardware*) dan harus diservice dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Waktu penggunaan sampai terjadi kerusakan



Dari pemakaian selama 2-3 tahun ini sejak pembelian masih sekitar 52% yang masih sering menggunakan laptop tersebut, 12% sudah jarang digunakan, dan 33% sudah tidak digunakan lagi karena rusak, sebagaimana terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Penggunaan produk pada Tahun 2024

Melihat hasil survey pada Gambar 7, dapat disimpulkan bahwa dalam 2-3 tahun sejak pembelian, hanya 36% laptop yang masih dalam kondisi baik, tidak pernah mengalami kerusakan. Sebagian besar pernah mengalami perbaikan, bahkan 18% responden mengalami kerusakan saat barang masih kurang dari 6 bulan pemakaian sehingga 33% laptop yang dibeli sudah tidak digunakan karena rusak.

2) Kesesuaian Kuantitas

Aspek lain yang menentukan *value for money* adalah keterpenuhan dari aspek kuantitas atau jumlah yang dapat disediakan oleh penyedia. Jika dilihat dari hasil survei pada Gambar 9, sekitar 90% kebutuhan dari pemerintah yaitu Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat dipenuhi oleh para penyedia dengan tepat waktu, sekitar 5% masih dapat dipenuhi meskipun mengalami keterlambatan dan sisanya sebesar 5% tidak dapat dipenuhi oleh penyedia.

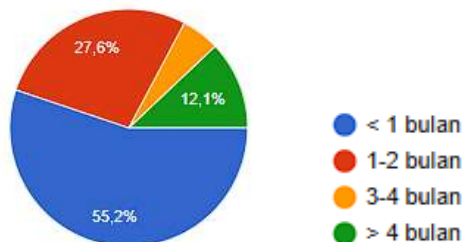
3) Kesesuaian Waktu

Dari aspek Kesesuaian Waktu Pemenuhan Kebutuhan, sekitar 90% pengadaan laptop melalui konsolidasi pengadaan dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Kalaupun ada keterlambatan, keter-

lambatan tersebut tidak lebih dari 1-2 bulan. Lama waktu pemenuhan barang umumnya (55%) kurang dari satu bulan, sekitar 28% kebutuhan laptop dapat dipenuhi dalam waktu 1-2 bulan, dan sisanya kebutuhannya dipenuhi dalam waktu lebih dari 3 bulan sebagaimana terlihat pada Gambar 10.



Gambar 9. Pemenuhan kuantitas pesanan



Gambar 10. Lama waktu pemenuhan pesanan

4) Kesesuaian Lokasi Pemenuhan Kebutuhan

Dari aspek lokasi, lebih dari 93% pengadaan laptop melalui konsolidasi pengadaan sudah sesuai dengan kebutuhan, dimana laptop dikirimkan ke lokasi yang telah ditentukan (Gambar 11).

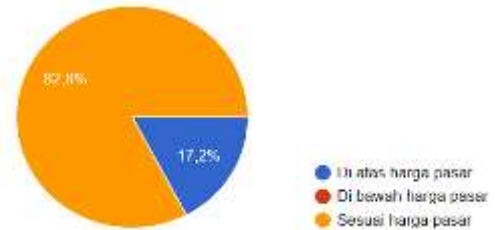


Gambar 11. Kesesuaian lokasi pengiriman pesanan

5) Kesesuaian Biaya pada Pengadaan Laptop PDN

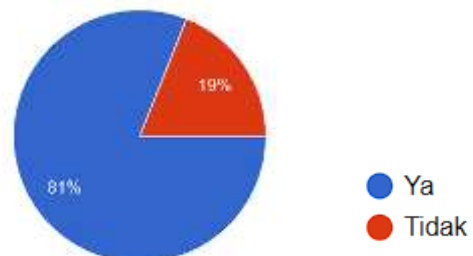
Dari aspek harga yang harus dibayar oleh responden, sekitar 82,8% produk laptop dibeli sesuai dengan harga pasar, dan 17,2% yang melakukan pembelian produk dengan harga di atas harga pasar (Gambar 12). Pada konsolidasi Pengadaan laptop produk dalam negeri telah ditetapkan batas harga tertinggi oleh pemerintah

sesuai dengan hasil negosiasi antara LKPP dengan beberapa prinsipal. Dari batas tertinggi tersebut Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga dan layanan yang terbaik dari penyedia, dan 81% responden telah melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik (Gambar 13). Dari hasil negosiasi tersebut 45% menyatakan tidak mendapatkan penurunan harga, 47% mendapatkan diskon antara 1-5%, dan hanya 8% yang mendapatkan diskon diatas 5 sampai 10%.



Gambar 12. Harga pembelian laptop

Pada konsolidasi pengadaan Laptop produk dalam negeri biaya yang dibebankan oleh penyedia kepada pembeli sudah termasuk harga produk namun tidak termasuk biaya pengiriman. Sehingga sebagian besar penyedia membebankan biaya kirim kepada pembeli sesuai dengan tarif umum yang berlaku. Namun ada 30% jumlah pembelian yang mendapatkan gratis ongkos kirim.



Gambar 13. Proses negosiasi pada pembelian laptop

6) Kesesuaian Penyedia pada Pengadaan Laptop PDN

Dari aspek penyedia, dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada pembeli. Pada umumnya (88%) layanan yang diberikan oleh penyedia kepada pembeli adalah berupa garansi service. Beberapa penyedia lainnya memberikan layanan berupa gratis ongkos pengiriman (30%). Hanya ada 5% penyedia yang tidak memberikan layanan kepada pihak pembeli.

Pada pembelian laptop produk dalam negeri melalui konsolidasi pengadaan, pada umumnya pihak pembeli melakukan pemilihan penyedia didasarkan pada jumlah pembelian yang

telah disuplai oleh penyedia tersebut dan juga berdasarkan hasil review pembeli sebelumnya (50%). Sebagian lagi para pembeli melakukan pemilihan penyedia didasarkan pada harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan penyedia yang lainnya (35%). Alasan berikutnya adalah karena lokasi penyedia yang dekat dengan pembeli, dengan pertimbangan ongkos pengiriman menjadi lebih rendah (17,5%). Berikutnya dasar pemilihan penyedia ditentukan berdasarkan produk yang dijual dimana laptopnya merupakan kualitas yang paling baik (15%).

Dengan melihat hasil survei di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan penyedia pada konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri melalui katalog elektronik sudah mempertimbangkan kinerja para penyedia tersebut dengan melihat hasil review dan banyaknya penjualan yang dilakukan penyedia. Selain itu aspek harga, lokasi penyedia dan kualitas dari produk yang dijual juga sudah menjadi pertimbangan para pembeli. Harapannya penyedia tersebut akan memberikan layanan yang baik, harga yang baik, juga kualitas produk dan waktu penyerahan yang sesuai juga.

Pada proses pengadaan laptop melalui konsolidasi, tentu menemui berbagai kendala. Berdasar analisis permasalahan pada pengadaan laptop produk dalam negeri, ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terkait kualitas produk hasil konsolidasi pengadaan Laptop PDN
Terkait dengan kualitas produk, 40% responden tidak mengalami permasalahan/ kendala. Namun sekitar 60%-nya merasakan beberapa permasalahan pada laptop PDN yang dibelinya, yaitu terdapat 25% yang menyatakan cepat rusak dan 40% menyatakan performanya kurang baik jika dibandingkan dengan laptop yang non TKDN. Beberapa kendala dan masalah tersebut diantaranya:
 - Cepat panas, kipas mudah rusak, hard disk mudah rusak, dalam segala aspek tidak mampu menunjang pekerjaan yang membutuhkan efisiensi waktu dalam bekerja.
 - Jenis/Merk RAM yang digunakan kurang baik sehingga cepat mengalami kerusakan, prosesor yang digunakan Core i-3 generasi 8 dimana masih sangat berat untuk memproses rumus excel maupun aplikasi lainnya.
 - Jenis/Merk SSD yang digunakan kurang baik sehingga cepat mengalami kerusakan, sebagian menggunakan Prosesor Core i-3

generasi 6 sehingga cukup berat untuk digunakan aplikasi lainnya.

- Jenis RAM yang digunakan kurang baik,
- Baterai yang kurang daya tahannya
- Suara kipas berisik.

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas maka kualitas laptop yang digunakan untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun peralatan tik dan media pembelajaran masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat *mensupport* kelancaran pekerjaan organisasi pemerintah.

- 2) Permasalahan terkait kuantitas produk hasil konsolidasi pengadaan Laptop PDN

Pada aspek kuantitas, sebagian besar responden tidak menemui permasalahan, karena kebutuhan laptop yang diadakan dapat dipenuhi dalam jumlah yang tepat. Hanya ada beberapa responden yang menyatakan bahwa kebutuhannya tidak bisa semuanya dipasok karena adanya keterbatasan stok. Namun hal ini dapat segera diatasi dalam waktu 1 sampai 2 bulan.

- 3) Permasalahan terkait waktu pemenuhan produk pengadaan Laptop PDN

Demikian juga pada aspek waktu pemenuhan produk, 90% menyatakan bahwa produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang tepat. Hanya 10% yang menyatakan adanya keterlambatan hingga 1-2 bulan.

- 4) Permasalahan terkait 116 okasi pengiriman produk pengadaan Laptop PDN

Selaras dengan dua aspek sebelumnya, terkait dengan aspek pengiriman 116 okasi seluruh responden menyatakan tidak memiliki masalah. Hanya ada beberapa responden saja yang sedikit terkendala dalam aspek pengiriman karena 116 okasi kantor yang jauh jaraknya, namun produk laptop PDN tersebut sudah sampai di 116okasi penerimaan yang sesuai.

- 5) Permasalahan terkait layanan penyedia pengadaan laptop PDN

Terkait dengan aspek layanan yang diberikan oleh penyedia laptop produk dalam negeri, 95% responden menyatakan tidak menghadapi masalah, hanya 5% responden yang menyatakan bahwa layanan yang diberikan penyedia kurang baik dan bahkan ada tendensi seakan laptop yang rusak akibat dari user yang membongkar laptop tersebut. Namun secara umum layanan yang diberikan oleh para penyedia laptop produk dalam negeri dapat dikatakan baik.

- 6) Permasalahan terkait harga/biaya pada pengadaan Laptop PDN
- Demikian juga dengan aspek harga/biaya dalam pengadaan laptop PDN, lebih dari 83% responden menyatakan tidak ada masalah terkait hal tersebut. Namun terdapat 17% responden yang menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia lebih mahal/di atas harga pasar di luar katalog elektronik dan harga juga ada yang tidak dapat dinegosiasikan. Tentu dalam hal ini perlu ada juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para penyedia yang menetapkan harga di atas batas tertinggi dari harga yang ditentukan pada surat edaran kepala LKPP tentang pedoman pelaksanaan konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri.

Setelah dilakukan analisis efektivitas pengadaan laptop PDN dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaannya, dapat diketahui beberapa faktor yang sangat menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengadaan laptop produk dalam negeri. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- 1) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan yang dilakukan kepada pengguna (*user*)
- 2) Analisis rekapitulasi kebutuhan pengguna dari RUP yang menentukan spesifikasi laptop yang akan disediakan pada etalase konsolidasi Laptop PDN.
- 3) Pertemuan dan negosiasi antara LKPP dengan para principal yang potensial menyediakan kebutuhan laptop bagi pemerintah. Dari pertemuan dan negosiasi inilah akan memberikan harga yang kompetitif dari para principal.
- 4) Mekanisme pengawasan dan pelaporan pada saat para penyedia dan prinsipal tidak memenuhi pesanan baik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, maupun lokasi serta harga/biaya pengadaan.

Dengan melihat faktor-faktor diatas, dan berbagai permasalahan yang terjadi, maka berbagai langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pengadaan laptop dalam mendukung peningkatan Penggunaan produk dalam negeri adalah:

- 1) Tingkatkan perencanaan program dan menyusun spesifikasi dan menghitung kuantitas produk yang diperkirakan akan dibeli oleh instansi pemerintah pada tahun berikutnya.

- 2) Menyediakan media untuk menyampaikan komplain kepada para prinsipal terkait dengan kualitas produk yang kurang memuaskan.
- 3) Mendorong kesiapan industri/produsen untuk meningkatkan kualitas produk dan *Quality Control* pada produksi laptop produk dalam negeri.
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konsolidasi pengadaan laptop PDN yang perlu ditingkatkan.
- 5) Menyediakan media untuk menyampaikan komplain kepada para prinsipal terkait dengan kualitas produk yang kurang memuaskan

Hasil evaluasi tersebut perlu ditindaklanjuti mengingat pentingnya keberlanjutan pemakaian produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tindak lanjut dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri atas produksi laptop yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi permintaan *user*. Pihak lainnya adalah LKPP sebagai regulator pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa agar dapat dihasilkan pembelian produk yang berkualitas dan sesuai dengan harga di pasaran (harga bersaing).

KESIMPULAN

Dari kajian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Hasil evaluasi efektivitas dan efisiensi pengadaan laptop ber-TKDN yang dibeli oleh pemerintah melalui program konsolidasi nasional di Indonesia sudah efektif dengan terpenuhinya sebagian besar kebutuhan organisasi meski masih terdapat kekurangan pada aspek spesifikasi laptop. Dari aspek efisiensi konsolidasi pengadaan laptop lebih efisien dibanding pengadaan satuan tiap institusi. Pembeli telah mendapatkan *value for money* pada aspek kuantitas pasokan, waktu dan tempat penyerahan, harga/biaya serta penyedia dan layanannya. Namun dari aspek kualitas masih ditemui berbagai keluhan.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadaan laptop PDN diantaranya proses identifikasi kebutuhan dan penetapan spesifikasi serta negosiasi harga produk laptop PDN yang akan dikonsolidasikan, juga pengawasan dan pelaporan saat proses pengadaan.

- 3) Permasalahan proses pengadaan laptop PDN dengan konsolidasi adalah pada aspek kualitas produk, yaitu *processor*, RAM dan HDD yang kurang berkinerja baik sehingga sebagian produk yang dibeli mengalami booting dan loading aplikasi yang lambat, sering “hang,” kipas dan charger yang rusak, serta cukup banyak laptop yang rusak sebelum 6 bulan pemakaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ferdian, A., & Reski, K. 2020. Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2): 45-52.
- Fingkreuw. 2022. Efektivitas perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan di kota Jayapura provinsi Papua. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Junaedi, E. 2019. Efektivitas Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2): 238-250.
- Jusniati, Parawangi, A., Wahid, N. 2022. Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(2): 599-611.
- Mangerongkonda, Y. Rompas, W., Mambo, R. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Didesa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74): 1-7.
- Perestroika, G.D. 2022. Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja (PKRR) Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Awal. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 10(2).
- Sari, N.I., Sangrio, F.A.E., Bimantara, M.A., dan Carmidah. 2023. Menakar Efektivitas Rasa Bangga Dalam Penggunaan Produk Lokal Untuk Meningkatkan Eksistensi UMKM. Cemerlang. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2): 8-18.
- Tanesia, RK. 2018. Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(4): 247-254.
- Wibowo, AS. 2022. Indikator Pertanian (R. Setiawati & T. H. Marpaung (eds.)). Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Yulianti, E. 2023. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Peguruan Tinggi. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3): 1448-1455.
- Zulmawan, W. 2023. Efektivitas Aturan Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1): 2152-2167 (September 2023).
- Zakaria, AH. Firdaus, F., Arifin, KF., Munawar, M., Gunawan, A. 2023. Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1): 318-323 (Januari 2023).

Lampiran 1. Data responden

| No | Instansi | Kab/Kota |
|----|--|------------------------|
| 1 | SEAQIL | Jakarta Selatan |
| 2 | RSUD Pesanggrahan | Jakarta Selatan |
| 3 | Pemda tulungagung | tulungagung |
| 4 | Perangkat daerah | Kabupaten Probolinggo |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Konawe Utara |
| 6 | DINAS PUPR | Ende |
| 7 | Dinas Perhubungan | Konawe Utara |
| 8 | Sekretariat daerah | Kabupaten Tasikmalaya |
| 9 | Sekretariat Daerah Prov. Kalteng | Palangka Raya |
| 10 | Pemda Maros | Kab. Maros |
| 11 | Kanwil Kemenag Sumsel | Palembang |
| 12 | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE | Kota Serang |
| 13 | Setda NTB | Mataram |
| 14 | POLDA Kalimantan Barat | Kota Pontianak |
| 15 | Kementerian Agama | Padang |
| 16 | Setda Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Konawe Utara |
| 17 | Bagian pengadaan barang dan jasa | Kota kendari |
| 18 | Bagian PBJ | Konawe Utara |
| 19 | Pemerintah daerah | Kota kendari |
| 20 | Dinas komunikasi dan informatika | Konawe Utara |
| 21 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari | Kendari |
| 22 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara | Kabupaten Konawe Utara |
| 23 | DPMPTSP Jatim | Surabaya |
| 24 | Perangkat daerah | Kab.Gorontalo Utara |
| 25 | Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kendari |
| 26 | Pemerintah Daerah | Kota Kendari |
| 27 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari | Kota Kendari |
| 28 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari | Kota Kendari |
| 29 | bagian PBJ setda kota kendari | Kota Kendari |
| 30 | Pemerintah Daerah | Kota Kendari |

| No | Instansi | Kab/Kota |
|----|---|--------------------------|
| 31 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | Kota Kendari |
| 32 | BPBJ Sekretariat daerah Kota Kendari | Kota Kendari |
| 33 | Pemerintah Daerah Kota Kendari | Kota Kendari |
| 34 | Sekretariat Pemerintah Daerah | Kota Kendari |
| 35 | Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Kota Kendari |
| 36 | BPBJ Pemerintah Kota Kendari | Kota Kendari |
| 37 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | Kota Kendari |
| 38 | UKPBJ Kota kendari | Kota Kendari |
| 39 | Sekretariat kota Kendari Bagian UKPBJ | Kendari |
| 40 | Pemerintah Kota Kendari | Kota Kendari |
| 41 | Pemerintah Daerah | Kota Kendari |
| 42 | Perangkat Daerah | KOTA KENDARI |
| 43 | Pemerintah Daerah | Kabupaten Pasuruan |
| 44 | Kementerian Agama | Jakarta Selatan |
| 45 | Kementerian Kominfo dan Digital | Mamuju |
| 46 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Jakarta Pusat |
| 47 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Jakarta Pusat |
| 48 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Jakarta Pusat |
| 49 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Jakarta Pusat |
| 50 | Kementerian Kominfo dan Digital | Jakarta Pusat |
| 51 | Setda Kab Gunungkidul | Gunungkidul |
| 52 | Kementerian Kominfo dan Digital | Jakarta |
| 53 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Bogor |
| 54 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Jakarta Pusat |
| 55 | Kementerian Agama | Jakarta Selatan |
| 56 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Jakarta Pusat |
| 57 | Bagian pengadaan barang/jasa | Pangkajene dan kepulauan |
| 58 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan | Belitung |
| 59 | Kementerian Komdigi | Jakarta Pusat |